

Setengah Hati Afirmasi Gender?

RABU (KLIWON) 27 MARET 2013
15 JUMADIL AWAL 1434 H
JUMADIL AWAL 1946

Dadang Iskandar

Dosen Kopertis IV Jabar Banten
dpk FKIP Unpas Bandung



GONG pencalonan anggota legislatif untuk DPR, DPD, dan DPRD sudah mulai ditabuh. Meski sudah diputuskan bahwa kuota gender perempuan yang dicalonkan oleh partai politik harus 30 persen, masih banyak yang meragukan bahwa kuota tersebut bisa sepenuh hati diimplementasikan.

Tindakan KPU menolak usulan parpol yang tidak memenuhi kuota gender perempuan 30% harus ditegakkan sebab kuota gender perempuan telah diundangkan dalam UU No.8/2012 tentang Pemilihan Umum anggota DPR, DPD dan DPRD. Dalam UU itu ditegaskan bahwa calon anggota (caleg) bergender perempuan harus ada di setiap kelipatan tiga. Demikian halnya dalam UU No.10/2008 tentang Pemilu Legislatif dan UU No.2/2008 tentang Partai Politik (Parpol), diundangkan bahwa kuota keterlibatan gender perempuan dalam dunia

politik adalah sebesar 30 persen yang duduk dalam parlemen.

Perlu disadari, keikutsertaan perempuan dalam partai politik merupakan kemajuan politik dalam demokrasi di Indonesia. Kehadiran perempuan tidak kalah penting dan tidak layak dinomorduakan dalam panggung politik di Indonesia. Untuk itulah, konsistensi kuota gender perempuan dalam calon legislatif menjadi penting dan agar tidak berjalan sepele hati.

Afirmasi (penegasan) gender perempuan ini akan berimplikasi positif terhadap partai politik, yaitu akan mendorong perbaikan di internal partai. Parpol mau tidak mau akan membuka ruang bagi perempuan untuk memperoleh hak yang sama. Jangan ada kesan di internal partai politik, bahwa afirmasi akan membelenggu, tapi harus dipandang sebagai konteks memperbaiki politik secara konstruktif.

Kalau dibandingkan dengan

negara-negara Asia lain, gender perempuan Indonesia yang aktif di parlemen relatif jauh tertinggal bersama Sri Lanka dan Irak. Namun, sedikit lebih baik ketimbang negara di Timur Tengah dan Selatan, kecuali Suriah, Israel, Siprus, dan India. Di Asia Tenggara dan Timur, representasi gender perempuan Indonesia di parlemen lebih tinggi dibandingkan dengan Singapura dan Korea Selatan, tetapi lebih rendah daripada Malaysia dan Thailand, dan jauh tertinggal dari Vietnam, Laos, Korea Utara, dan Cina.

Parlemen

Dalam struktur parlemen ketentuan 30 persen gender perempuan belum tercapai. Hanya 12 persen dari hasil Pemilu 2004 dan 18 persen dari Pemilu 2009. Secara politik, partisipasi gender perempuan untuk turut menentukan kebijakan politik (*political ideas*) dan kehadiran dalam politik (*political presence*), juga belum signifikan. Pada Pemilu 2014, perlu usaha strategis meningkatkan keterwakilan gender perempuan di parlemen dengan membangun kekuatan politik lewat UU gender.

Terpenting lagi, penyadaran hadirnya aksi edukasi kon-

struktif politik gender yang selama ini masih rendah serta bagaimana memosisikan gender perempuan di ranah politik dengan kemampuan mumpuni. Dengan besarnya kuota di parlemen, peluang perempuan untuk duduk dan memberikan sumbangsih pemikiran melalui perundangan akan kentara dan tidak lagi dipandang sebelah mata.

Menohok satu persyaratan dalam perundangan pemilu, tentunya kita tidak ingin tinta hitam yang terjadi pada Pemilu 2004-2009, yakni ada kekecewaan masyarakat ketika partai politik mengajukan para calon legislatif hanya untuk sekadar memenuhi ketentuan perundangan, akan terulang. Saat itu, gender perempuan tetap ditempatkan pada urutan paling bawah. Selain itu, para calon cenderung kental dengan kedekatan hubungan para petinggi parpol, yang dibela oleh berbagai argumen kader. Tentunya sangat disayangkan masih adanya pelencengan pemaknaan pasal gender dari komitmen awal. Ini berarti ada kelemahan dalam partai politik saat melakukan regenerasi secara seimbang antara laki-laki dan perempuan.

Perlu diingat bahwa ek-

sistensi perempuan dalam "per-caleg-an" mempersyaratkan kolektivitas kampanye sesama caleg gender perempuan dalam Pemilu 2014. Kolektivitas ini penting sebab harus menjadi blok politik tersendiri; blok politik lintas partai. Dengan demikian, ketika kampanye berlangsung, sikap saling mendukung dan tidak melihat apa pun partainya, menjadi hal lumrah. Gender perempuan harus membuang jauh-jauh paradigma kampanye individualistiknya karena kompetitor mereka adalah caleg laki-laki.

Dengan demikian, demokrasi setidaknya dapat membuat pendewasaan perempuan menjadi lebih baik dalam berpolitik. Kini perempuan bukan lagi hanya dipandang sebagai identitas homogen yang seragam. Isu gender perempuan Indonesia harus lebih maju menjadi dirinya sendiri, membuat karier gemilang, dan memegang posisi dalam pemerintahan, lembaga pendidikan, dan lembaga penting negara. Tulisan ini merupakan dorongan ikhlas dari seorang lelaki yang semakin menyadari bahwa lelaki dilahirkan dari seorang ibu yang notabene bergender perempuan. ***